



Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hang Tuah

No : SPMIUHT-FORM-SM-14-01

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Ke XXV (TINDAK LANJUT AMI XXIV)

Rapat tanggal : 03 Maret 2023	Nomor Undangan Rapat : Und/088/UHT.C3/III/2023
Hal : RTM XXV (TINDAK LANJUT AMI XXIV)	

NO	TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA TINDAK LANJUT (EVALUASI)	BATAS WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
	AMI XXIV telah terlaksana pada 31 Januari -08 Februari 2023. Temuan yang perlu mendapat perhatian dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen-RTM XXV, antara lain:			
A.	<p>Standar PKM</p> <p>1. Prodi Psikologi, Prodi Oseanografi, Prodi Administrasi Bisnis, Prodi TRPK FVP dan Program Doktor Administrasi Publik, belum optimalnya pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk bahan ajar, hal mana dokumen hasil pemanfaatan hasil pengabdian untuk bahan ajar belum tersedia.</p> <p>Referensi pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam dokumen SPMI, khususnya Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Hasil Pengabdian Masyarakat SPkM-01 Luaran PkM menyebutkan “<i>Laporan dan luaran hasil PkM seperti: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. <u>bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</u></i>” 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pedoman integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk bahan ajar termasuk proses implementasi dan evaluasi. Draf pedoman telah dibuat LP3 dan koordinasi dengan LPPM. Serta perlu sosialisasi. • Agar dilakukan evaluasi RPS secara berkala dan memasukkan tema yang berkaitan dengan integrasi hasil PKM dosen 	<p>1 Semester</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selesai hingga 30 Maret 2023 telah disosialisasikan • Pada 30 Juni 2023 terimplementasi <p>Evaluasi setiap semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor I. • LP3 dan LPPM dalam penyusunan dan sosialisasi pedoman integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk bahan ajar

NO	TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA TINDAK LANJUT (EVALUASI)	BATAS WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> • SPkM-02 Pemanfaatan hasil pengabdian untuk bahan ajar menyebutkan “<u>Tersedianya Dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa, sebagai rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan, sebagai bahan pengembangan iptek yang dapat digunakan sebagai model pengembangan skala global</u>”. <p>2. Informasi dari LPPM, bahwa belum adanya hasil penilaian kepuasan mitra dan kelompok sasaran terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Referensi pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriks APT lampiran 6d Perban PT No 3-2019-Matriks-Penilaian-IAPT-3_0-PTA-PTS. Butir 8 menyebutkan : Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek :3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. • Permendikbud 03 tahun 2020 tentang SN DIKTI Pasal 60 ayat 4 <u>Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat;</u> • Dalam dokumen SPMI, khususnya Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Penilaian PkM SPkM-28 Penilaian Kepuasan Mitra menyebutkan “<i>Mitra dan kelompok sasaran</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM Penyusunan kuisisioner kepuasan mitra (PKM) untuk pedoman laporan survey kepuasan • Pelaksanaan PKM diprioritaskan sesuai Perjanjian Kerjasama - PKS dengan Pemerintah Kota Surabaya • Pelaksanaan penilaian kepuasan mitra dan kelompok sasaran terhadap kegiatan PKM akan dimulai pada semester berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir Juni 2023 untuk LPPM • Setiap akhir periode pelaksanaan PKM untuk UPPS 	<ul style="list-style-type: none"> • LPPM untuk Penyusunan kuisisioner kepuasan mitra (PKM) untuk pedoman • UPPS untuk memprioritaskan pelaksanaan PKM di wilayah Pemerintah Kota Surabaya sesuai PKS • Tim PKM di UPPS dalam laporan menyertakan hasil kepuasan mitra

NO	TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA TINDAK LANJUT (EVALUASI)	BATAS WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
	<i>pengabdian kepada masyarakat merasa puas dan kegiatannya berkelanjutan”</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UPPS yang melaksanakan dalam laporan menyertakan hasil kepuasan mitra. 		
B	<p>Standar SDM</p> <p>1. Pada Prodi Psikologi dan Prodi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal, belum ada dokumen perencanaan SDM Dosen yang memuat persediaan dan kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Pada Biro SDM Daftar Susunan Personil-DSP perencanaan kualifikasi dosen masih dalam proses revisi.</p> <p>Referensi pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriks Penilaian APT lampiran 6d Perban PT No 3/2019 Matriks-Penilaian IAPT 3.0. Butir 6 menyebutkan : <u>Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi</u> yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 3) penempatan personal (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling) • Matriks Penilaian APT lampiran 6d Perban PT No 3/2019 Matriks-Penilaian IAPT 3.0. Butir 18 tentang Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. • Matriks Penilaian APS lampiran Perban PT No 5/2019 Matriks-Penilaian APS Butir 18-19 tentang Kecukupan, Kualifikasi dan jabatan akademik DTPS. • Dalam dokumen SPMI, khususnya Standar Sumber Daya Manusia SSDM-03 Perencanaan kualifikasi dosen bahwa <i>Unit pengelola</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu menyusun perencanaan SDM Dosen yang memuat persediaan dan kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi pada Prodi psikologi dan Prodi Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal -TRPK. Pada prodi TRPK Prodi membuat perencanaan dosen dengan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan oleh Ditjen Hubla maupun Dikti terkait dengan kompetensi profesi. • Diusulkan Biro SDM dapat segera menyelesaikan penyusunan Daftar Susunan Personil-DSP • Masing-masing fakultas menyusun perencanaan SDM 	30. Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi Psikologi dan Prodi TRPK menyusun perencanaan SDM Dosen • Biro SDM menyelesaikan penyusunan DSP

NO	TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA TINDAK LANJUT (EVALUASI)	BATAS WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
	<p><i>memiliki dokumen perencanaan SDM Dosen memuat persediaan dan kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi</i></p> <p>2. Pada Prodi Psikologi, dan Satker Pusat Bahasa, belum ada dokumen perencanaan SDM (tenaga kependidikan) yang memuat persediaan dan kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.. Sedangkan pada Biro SDM Daftar Susunan Personil-DSP perencanaan kualifikasi tenaga kependidikan masih dalam proses penyusunan.</p> <p>Referensi pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriks APT lampiran 6d Perban PT No 3-2019-Matriks-Penilaian-IAPT-3_0-PTA-PTS. Butir 6 • Matriks Penilaian APT lampiran 6d Perban PT No 3/2019 Matriks-Penilaian IAPT 3.0. Butir 29 tentang Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) • Matriks Penilaian APS lampiran Perban PT No 5/2019 Matriks-Penilaian APS Butir 31 tentang kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) • Permendikbud 03 tahun 2020 tentang SN DIKTI Pasal 32 ayat (1) – ayat (4) • Dalam dokumen SPMI, khususnya Standar Sumber Daya Manusia SSDM-04 Perencanaan kualifikasi tenaga kependidikan bahwa <i>Unit pengelola memiliki dokumen perencanaan SDM Tenaga Kependidikan yang memuat persediaan dan kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dokumen perencanaan SDM tenaga kependidikan yang memuat persediaan dan kebutuhan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi pada prodi psikologi dan satker Pusat Bahasa. • Diusulkan pada Biro SDM segera menyelesaikan penyusunan DSP tenaga kependidikan. 	30 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi Psikologi, dan Satker Pusat Bahasa menyusun perencanaan SDM tenaga kependidikan • Biro SDM menyelesaikan penyusunan DSP tenaga kependidikan

NO	TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA TINDAK LANJUT (EVALUASI)	BATAS WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
C	<p>Standar MBKM</p> <p>1. Pada prodi yang melaksanakan MBKM, belum memiliki Dokumen Perencanaan Biaya Program MBKM yang meliputi penyusunan kurikulum, penyusunan panduan MBKM, pencarian mitra kerjasama, termasuk belum ada pedoman penggunaan dana. Termasuk pula belum adanya Panduan Penetapan dan Pelaksanaan biaya program MBKM yang meliputi; biaya proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian mahasiswa, fasilitas pembelajaran, proses pembelajaran dengan mitra kerjasama, pertukaran mahasiswa.</p> <p>Selama ini pelaksanaan MBKM masih lebih banyak mengikuti skema program pemerintah (Belmawa), sedangkan pedoman pembiayaan dana untuk MBKM mandiri belum disusun</p> <p>Referensi pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam dokumen SPMI, Standar MBKM khususnya <u>Standar Pembiayaan MBKM dalam SMBKM-20 tentang Pedoman Perencanaan Biaya Program MBKM dan SMBKM-21 tentang Panduan Penetapan dan Pelaksanaan biaya program MBKM</u> <p>2. Seluruh prodi pelaksanaan pembelajaran MBKM antar prodi dalam Perguruan Tinggi belum terimplementasi”</p> <p>Referensi pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam dokumen SPMI, Standar MBKM khususnya <u>Standar Fasilitas Mahasiswa dalam SMBKM-14 tentang Pelaksanaan Pembelajaran MBKM antar Prodi dalam PT</u> 	<p>Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran - LP 3 perlu ada pedoman terkait perencanaan biaya program MBKM</p> <p>• Fasilitasi LP3 untuk panduan teknis pelaksanaan pembelajaran MBKM antar prodi dalam Perguruan Tinggi.</p> <p>• Perlu mengoptimalkan Siakad – Sistem Informasi Akademik yang dapat</p>	<p>30 Juni 2023</p> <p>Semester Genap 2022/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> LP 3 menyusun Panduan Penetapan dan Pelaksanaan biaya program MBKM LP 3 melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Pelaksanaan biaya program MBKM LP 3 membuat panduan teknis pelaksanaan pembelajaran MBKM antar prodi dalam Perguruan Tinggi. LP 3 dan PTI berkoordinasi terkait Siakad – Sistem Informasi

NO	TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA TINDAK LANJUT (EVALUASI)	BATAS WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<p>memfasilitasi pelaksanaan MBKM antar prodi dalam PT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Implementasi pembelajaran MBKM antar prodi dalam Perguruan Tinggi 		<p>Akademik yang dapat memfasilitasi pelaksanaan MBKM antar prodi dalam PT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Implementasi pembelajaran MBKM antar prodi dalam Perguruan Tinggi
D	<p>Standar Sarana dan Prasarana</p> <p>1. Perpustakaan baru memiliki 3 jurnal internasional berlangganan dari 5 jurnal internasional yang dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://link.gale.com/apps/SPJ.SP01?u=idfpptij • https://link.gale.com/apps/SPJ.SP02?u=fpptijwt • https://www.clinicalkey.com/#/ <p>Referensi pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam dokumen SPMI, Standar Sarana dan Prasarana SSP-08 Perpustakaan ... tersedia minimal 5 jurnal internasional berlangganan. • Terkait pula Standar Pendidikan Khususnya Standar Pengelolaan Pembelajaran SDIK-63 tentang Jurnal Internasional menyebutkan Mempunyai minimal 5 jurnal berlangganan yang dapat diakses oleh sivitas akademika UHT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu memenuhi kekurangan jumlah 2 jurnal internasional berlangganan. • Fakultas yang memiliki langganan jurnal internasional dapat diinformasikan ke Perpustakaan Pusat dan disebarluaskan di lingkungan UHT • Mengotimalkan Kerjasama yang terjalin dengan UHT (STTAL, AAL, UPN) untuk mendukung jumlah jurnal berlangganan • Aksesibilitas untuk jurnal yang telah difasilitasi 	30 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor I. • Wakil Rektor III • Ka. Perpustakaan membuat pedoman aksesibilitas untuk jurnal yang telah difasilitasi perpustakaan dan melaksanakan sosialisasi

NO	TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA TINDAK LANJUT (EVALUASI)	BATAS WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		perpusnas perlu disosialisasikan		
E	<p>Standar Tata Pamong</p> <p>1. Pada Prodi Ilmu Hukum (S1) survey pemahaman Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS Prodi) sudah dilaksanakan tetapi belum dideskripsikan, sedangkan Prodi Psikologi, Prodi Teknik Elektro, Program Doktor Administrasi Publik Survey belum dilakukan Survey Pemahaman VMTS Prodi.</p> <p>Referensi pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan dokumen SPMI, khususnya Standar Tata Kelola Dan Tata Pamong menyebutkan STTP-03 - Pemahaman VMTS bahwa “Adanya dokumen laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian di fakultas/program studi/unit kerja tiap tahun” • STTP-04 - Sosialisasi VMTS bahwa “Adanya Survey Pemahaman VMTS prodi secara kontinu setiap pelaksanaan sosialisasi” <p>2. Pada SPI belum ditemukan <u>dokumen</u> dalam pembinaan pengawasan dan pengendalian (BINWASDAL) yang mendukung <i>ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).</i></p> <p>Referensi pendukung :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemahaman VTMS dari hasil survey perlu dideskripsikan dan bagi yang belum, perlu melaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun akademik. • Melakukan konsolidasi secara bersinergi pada satker yang terkait dalam penyusunan dokumen termasuk SOP mekanisme penyusunan dokumen laporan tahunan sebagaimana ketentuan PP 	<p>30 Maret pada prodi Hukum</p> <p>Akhir semester pada Prodi Psikologi, Prodi Teknik Elektro, Program Doktor Administrasi Publik serta prodi lainnya</p> <p>Pada tahun akademik berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi Ilmu Hukum (S1) perlu dideskripsikan hasil survey VTMS • Prodi Psikologi, Prodi Teknik Elektro, Program Doktor Administrasi Publik serta prodi lainnya melaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun akademik • Wakil Rektor I • Wakil Rektor I. • Wakil Rektor III • BP 2

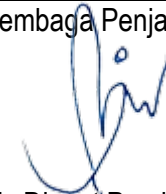
NO	TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA TINDAK LANJUT (EVALUASI)	BATAS WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
	<ul style="list-style-type: none"> • Matriks APT lampiran 6d dalam Perban PT No 3/2019 Matriks Penilaian IAPT-3.0, butir 4 point C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama. C.2.4.(a) Sistem Tata Pamong point D • Dalam dokumen SPMI, khususnya standar tata kelola STTP-08 Praktik Baik GUG. Terdapat dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> <p>3. Masing-masing satker perlu melakukan peninjauan ulang dan pengisian terkait dengan risk register yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.</p> <p>Referensi pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriks APT lampiran 6d Perban PT No 3-2019-Matriks-Penilaian-IAPT-3_0-PTA-PTS. Butir 4 point A. Ketersediaan dokumen formal system tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko • Matriks APT lampiran 6d Perban PT No 3-2019-Matriks-Penilaian-IAPT-3_0-PTA-PTS. Butir 4 point Point D. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan <u>manajemen risiko secara konsisten</u>, • Dalam dokumen SPMI, khususnya standar tata kelola STTP-05 Sistem Tata Pamong. Dokumen sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks 	<p>No 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan tinggi dan pengelolaan Perguruan tinggi khususnya pada pasal 33 ayat (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap Tahun Akademik Satker, dan Fakultas melakukan pengisian / updating pada formulir <i>Risk Register</i>. 	<p>Juli 2023 Setiap akhir akademik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh UPPS • Seluruh Satker

NO	TOPIK PEMBAHASAN	RENCANA TINDAK LANJUT (EVALUASI)	BATAS WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
	<p>institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan <i>mitigasi potensi risiko</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam dokumen SPMI, khususnya standar tata kelola STTP-08 Praktik Baik GUG. Terdapat dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> 			

Catatan Lembaga Penjaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu



Dr. Drs. Viv Djanat Prasita, M.App.Sc